

**DUALISME KEWENANGAN KPUD DAN PTUN DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA PENENTUAN KANDIDAT PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN
WAKIL KEPALA DAERAH (Studi Pemilukada Bangkalan Madura Periode 2013-2018)**

**(Hendri, 0910113285, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Tahun 2014, Jumlah
halaman 99)**

ABSTRAK

Pemilihan Umum (Pemilu) sebagai sebuah proses seleksi terhadap lahirnya pemimpin dalam rangka perwujudan demokrasi diharapkan menjadi representasi dari rakyat, karena pemilu merupakan suatu rangkaian kegiatan politik untuk menampung kepentingan masyarakat, yang kemudian dirumuskan dalam berbagai bentuk kebijaksanaan. Dengan perkataan lain, pemilu adalah sarana demokrasi untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang berkedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan yang digariskan oleh Undang-Undang Dasar. Putusan pengadilan tata usaha negara yang mengeluarkan suatu keputusan yang mengakibatkan mendiskualifikasikan pasangan calon pasangan Imam-Zainal Alim kepada KPUD Kabupaten Bangkalan yang membatalkan penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Bangkalan. Pasangan yang didukung kualifikasi Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) dan Partai Persatuan Nasional (PPN) itu dicoret setelah gugatan pengurus lama DPD partai Persatuan Daerah (DPD) Bangkalan dikabulkan PTUN Surabaya. Isi gugatan meminta PTUN agar pasangan Imam-Zain didiskualifikasikan karena mendaftar diri sebagai calon menggunakan Partai PPN. Bakal calon Bupati Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Imam Buchori melaporkan KPUD setempat ke Mahkamah Konstitusi (MK) atas pencoretan namanya sebagai calon bupati. Rumusan masalah yang dibahas adalah Bagaimanakah Proses Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan Periode 2013 – 2018, serta Apa Sengketa yang Timbul dari Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan Periode 2013 – 2018 dan Bagaimanakah dampak dari mekanisme penyelesaian sengketa penentuan kandidat dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan Periode 2013 – 2018. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat kualitatif dan deskriptif. Data penelitian meliputi data bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data adalah melalui studi kepustakaan berupa buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, serta pengumpulan data melalui media elektronik yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian maka penulis menyimpulkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam melakukan penetapan bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sudah sesuai peraturan perundang-undangan terkait dan juga dalam Peraturan Penyelenggaraan Komisi Pemilihan Umum. Pengajuan bakal calon K.H. Imam Bukhori dan Zainal Alim telah dilakukan oleh DPC PPN Kabupaten Bangkalan, maka hal tersebut sudah sah secara hukum. Bila cara tersebut yang dijadikan dasar oleh KPU Kabupaten Bangkalan dalam menetapkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan, maka Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2012 berdasarkan Berita Acara Nomor 55/BA/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2012 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Bangkalan Nomor 57/Kpts/KPUKab/014.329656/2012 juga sudah benar adanya.